



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI HARTONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**
3. NHK : **422043**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.177.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 277.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
3. Tanah Seluas 36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 199.000.000

1. MOTOR, YAMAHA FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. MOTOR, BENELLI BS 250 PE MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 324.765.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.151.914.698**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.852.929.698

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.852.929.698



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.